

**DAMPAK KONFRONTASI INDONESIA DAN MALAYSIA
TERHADAP EKONOMI TAHUN 1963-1966**

(Skripsi)

Oleh

DZAKY JULIANZAH ARIEF

2153033004



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DAMPAK KONFRONTASI INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP EKONOMI TAHUN 1963-1966

Oleh

Dzaky Julianzah Arief

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada masa era Perang Dingin pada tahun 1963 hingga 1966 ini merupakan respons dari Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dipandang sebagai proyek imperialisme Inggris di Asia Tenggara. Dalam konteks global Perang Dingin, ketegangan ini tidak hanya bernuansa regional, tetapi juga terkait dengan kepentingan blok Barat dan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana dinamika politik luar negeri Indonesia dalam konfrontasi tersebut memengaruhi kebijakan ekonomi nasional serta kondisi ekonomi domestik secara umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang terdiri dari empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data diperoleh dari arsip-arsip sejarah, dokumen resmi pemerintah, surat kabar, serta literatur sekunder dari para sejarawan dan ekonom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfrontasi Indonesia-Malaysia memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Fokus anggaran negara yang dialihkan ke sektor militer menyebabkan terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat yang mendukung Malaysia memburuk, yang berdampak pada menurunnya bantuan luar negeri dan investasi asing. Ketegangan politik luar negeri ini juga memperparah kondisi ekonomi domestik yang ditandai dengan inflasi tinggi, kelangkaan barang kebutuhan pokok, dan menurunnya daya beli masyarakat.

Kata Kunci: Dampak Ekonomi, Konfrontasi Indonesia-Malaysia

ABSTRACT

THE IMPACT OF THE CONFRONTATION BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA ON THE ECONOMY OF 1963-1966

By

Dzaky Julianzah Arief

The confrontation between Indonesia and Malaysia during the Cold War era from 1963 to 1966 was Indonesia's response to the formation of the Malaysian Federation which was seen as a British imperialist project in Southeast Asia. In the global context of the Cold War, this tension was not only regional in nature, but also related to the interests of the Western and Eastern blocs. This study aims to describe how the dynamics of Indonesian foreign policy in this confrontation influenced national economic policy and domestic economic conditions in general. The method used in this study is the historical method with a descriptive-analytical approach, consisting of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data sources were obtained from historical archives, official government documents, newspapers, and secondary literature from historians and economists. The results of the study show that the Indonesia-Malaysia confrontation had a significant impact on the Indonesian economy. The focus of the state budget shifted to the military sector, resulting in limited allocation of funds for economic development and people's welfare. In addition, Indonesia's relations with Western countries that supported Malaysia deteriorated, which resulted in a decrease in foreign aid and foreign investment. This foreign political tension also worsened the domestic economic conditions which were marked by high inflation, shortages of basic necessities, and declining purchasing power.

Keywords: Economic Impact, Indonesia-Malaysia Confrontation

**DAMPAK KONFRONTASI INDONESIA DAN MALAYSIA
TERHADAP EKONOMI TAHUN 1963-1966**

Oleh

DZAKY JULIANZAH ARIEF

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**DAMPAK KONFRONTASI INDONESIA
DAN MALAYSIA TERHADAP EKONOMI
TAHUN 1963-1966**

Nama Mahasiswa

Dzaky Julianzah Arief

Nomor Pokok

2153033004

Mahasiswa

Jurusan

Pendidikan IPS

Program Studi

Pendidikan Sejarah

Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan

1. MENYETUJUI

Konfisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.

NIP. 1981125008121001

Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 1987303192024211012

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial,

Koordinator Program Studi

Pendidikan Sejarah,

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.

NIP. 197411082005011003

Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.

NIP. 197009132008122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris

: Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.

Penguji

Bukan Pembimbing

: Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.

198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzaky Julianzah Arief
NPM : 2153033004
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan Turi Raya Tanjung Seneng No.56 Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2025



Dzaky Julianzah Arief
NPM 2153033004

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 29 Juli 2003, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Amzah Arieap dan Ibu Halena. Pendidikan penulis dimulai dari TK Mekar Sari Jakarta Timur (2007-2009), Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Agung (2009-2015), kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Lampung (2015-2018), setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung (2018-2021) dan pada

Tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung melalui jalur SIMANILA 2021. Pada semester VI penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMAN 1 Tanjung Sari. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa (FOKMA) Pendidikan Sejarah menjadi ketua bidang Sosmas (2024). Penulis juga terlibat aktif dalam seminar nasional Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung dengan tema *"Memperteguh Eksistensi NKRI Melalui Jalur Rempah Lada Lampung Sebagai Warisan Sejarah Dunia"* (2022). Selain itu, penulis juga terlibat aktif dalam berdiskusi di dalam kelas ketika pembelajaran mata kuliah berlangsung serta terlibat dalam partisipasi pelatihan kepramukaan pada tahun 2021.

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts."

—Winston Churchill

"Skripsi ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari babak baru untuk terus belajar dan berkembang."

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti, Aamiin. Dengan kerendahan hati dan rasa Syukur, saya persembahkan sebuah karya ini sebagai tanca cinta dan sayangku kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Ir. Amzah Arief dan Ibu Halena yang telah melahirkan saya ke dunia ini dan membesarkan serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan selalu memberikan doa, motivasi, serta membimbingku dengan tulus dan tanpa henti mendoakan saya dan berjuang selalu untuk saya agar tercapai semua cita-cita saya. Teruntuk kakakku tersayang, Allan Victoryzah Arief, S.P., terimakasih karena selalu mendoakan saya agar selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalani studi.

Untuk Almamaterku Tercinta

“UNIVERSITAS LAMPUNG”

SANWANCANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi yang berjudul **“Dampak Konfrontasi Indonesia Dan Malaysia Terhadap Ekonomi Tahun 1963-1966”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Suparman Arif S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing I skripsi penulis, terima kasih banyak atas segala segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya

selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Universitas Lampung.

8. Bapak Marzius Insani S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih banyak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembahas skripsi penulis, terimakasih banyak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, dan para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
11. Marlian Adi Saputra, Agil Septa Priambodo, Alifian Faridz Ramadhan, Nuri Muthi Lathifah, terima kasih sudah membantu dan menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi.
12. Teman-teman sepembimbing akademik, terima kasih atas dukungan serta semangat kepada penulis selama ini.
13. Teruntuk Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 terimakasih banyak atas semua dukungan, kebersamaan, dan kenangan indah yang kita lalui bersama selama menempuh perkuliahan di Prodi Sejarah tercinta akan selalu menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup saya

Bandar Lampung, Juli 2025

Dzaky Julianzah Arief
NPM. 2153033004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian.....	8
1.4.1 Secara teoritis	8
1.4.2. Secara Praktis	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Dampak Konfrontasi Indonesia Malaysia	11
2.2 Dampak Ekonomi Konfrontasi Indonesia-Malaysia.....	12
2.3 Latar Belakang Sejarah Perang Dingin	18
2.4 Latar Belakang Konfrontasi Indonesia-Malaysia.....	19
2.5 Jalannya Konfrontasi Indonesia Malaysia	25
2.6 Kajian Penelitian Terdahulu.....	28
III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	30
3.2. Metode Penelitian.....	30
3.3. Teknik Pengumpulan Data	33
3.4. Teknik Analisis Data.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Dampak Kebijakan Konfrontasi terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional (1963–1966).....	36
4.1.2 Dampak Ekonomi Terjadinya Konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada Masa Era Perang Dingin Tahun 1963-1966.....	39

4.2 Pembahasan.....	41
4.2.1 Penurunan Perdagangan Lintas Negara	41
4.2.2 Krisis Ekonomi di Indonesia	47
4.2.3 Dampak Terhadap Investasi Asing	56
4.2.4 Krisis Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.....	61
V. KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesiimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arsip Ekspor Komando Aksi Front Nasional Mengganjang Malaysia	43
Gambar 2. Arsip Impor Komando Aksi Front Nasional Mengganjang Malaysia	44
Gambar 3. Arsip Program Aksi Bidang Export-Drive untuk Menggantungkan Diri pada Bantuan Luar Negeri	45
Gambar 4. Arsip Komando Operasi Tertinggi Anggaran Belanja Tahun 1966	48

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 1963 hingga 1966, hubungan Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Perbedaan ideologi politik antara kedua negara memainkan peranan penting, dimana Indonesia di bawah Presidens Sukarno lebih condong ke arah Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme), sedangkan Malaysia condong pada kapitalisme dan aliansi dengan Barat (Suryadinata, 1978).

Pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 meningkatkan ketegangan karena Indonesia melihatnya sebagai bentuk neo-kolonialisme (Pickleleft, 1993). Dukungan internasional juga mempengaruhi dinamika hubungan ini. Malaysia mendapat dukungan dari Inggris dan negara Barat lainnya, sedangkan Indonesia mendapat dukungan dari Uni Soviet dan China (Tarling, 1992). Konfrontasi militer kedua negara terjadi melalui kegiatan infiltrasi dan operasi militer di wilayah perbatasan. Perubahan politik di Indonesia, terutama setelah kudeta gagal tahun 1965 yang diikuti dengan jatuhnya Sukarno dan bangkitnya Soeharto, juga mengubah hubungan kedua negara. Keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia pada tahun 1965 menambah kompleksitas situasi regional (Turnbull, 2009).

Pertemuan diplomatik dan perundingan yang diprakarsai oleh negara ketiga, serta momentum Perang Dingin, akhirnya turut meredakan ketegangan dan membawa kedua negara mencapai perdamaian pada tahun 1966 (Tarling, 1992). Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang kemudian dikenal dengan politik Konfrontasi, ialah sebuah perang urat syaraf tentang masa depan Malaysia, Brunei, Sabah dan Sarawak (Mackie, 1974). Hal ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1963 hingga 1966. Perang ini berasal dari keinginan pemerintah Malaysia yang ingin membentuk Federasi Malaya (FM) atau lebih dikenal dengan

Persekutuan Tanah Melayu. Tahun 1961 FM menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam wilayahnya. Hal ini tidak sesuai dengan Persetujuan Manila, maka keinginan itu ditentang oleh Presiden Soekarno. Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia (FM) yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai “boneka Inggris” yang merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru. Dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia (Ravico, 2021).

Pelanggaran perjanjian internasional terhadap konsep Rencana Macapagal melalui Perjanjian Manila tanggal 31 Juli 1963, kemudian 3 Agustus 1963 dan juga 5 Agustus 1963 tentang dekolonisasi harus mencakup seluruh penduduk Sarawak dan Sabah (Mackie, 1974). Pada tahun 1961, pulau Kalimantan dibagi menjadi empat pemerintahan. Kalimantan atau Kalimantan adalah sebuah provinsi di Indonesia. Perbatasan utaranya adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris, Sarawak dan Kalimantan Utara, kemudian Kalimantan Utara disebut Sabah (Audrey, 2004).

Sebagai bagian dari penarikan koloni Inggris dari Asia Tenggara, Britania Raya (Inggris) berupaya mengkonsolidasikan wilayah jajahannya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia. Pemerintah Indonesia menentang rencana pembentukan FM. Presiden Soekarno menilai Malaysia adalah boneka Inggris dan jika Indonesia bergabung dengan Malaysia (Harold, 1978), hal itu hanya akan memperkuat kendali dan kekuasaan Inggris di kawasan Asia Tenggara, dan sikap tersebut dapat semakin mengancam kemerdekaan Indonesia.

Filipina akhirnya mengklaim kedaulatan atas wilayah Sabah, mengutip hubungan historis Sabah dengan Filipina, melalui Kesultanan Sulu (Tarling, 1992). Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) melancarkan pemberontakan pada tanggal 8 Desember 1962 (Mackie, 1974). TNKU berusaha menangkap Sultan Brunei, yang menguasai ladang minyak, dan menyandera orang Eropa. Sultan Brunei melarikan diri dan mencari bantuan dari Inggris. Sultan Brunei menerima pasukan dari Inggris dan juga pasukan Gurkha dari Singapura. Pada tanggal 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris menyatakan seluruh pusat pemberontak

telah dikalahkan, kemudian pada tanggal 17 April 1963, pemimpin pemberontakan akhirnya ditangkap dan pemberontakan berakhir (Osborne, 2000).

Filipina dan Indonesia kemudian secara resmi sepakat untuk membentuk Federasi Malaysia jika mayoritas wilayah yang didekolonisasi memberikan suara dalam referendum yang diselenggarakan oleh PBB. Malaysia menganggap pembentukan federasi adalah urusan internal, tanpa campur tangan pihak luar, namun Indonesia menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Manila dan adanya kolonialisme dan imperialisme Inggris (Kusmayadi, 2017).

Hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan bagian yang alamiah. Karena kedekatan geografis ini ialah faktor penting yang tidak boleh dilupakan, bahwa Indonesia dengan Malaysia telah terlahir sebagai negara yang hidup berdampingan. Oleh karena itu pula, kedekatan geografis ini telah terjadi kontak-kontak politik pertukaran perdagangan dan bahkan perkawinan di antara kedua negara ini (Arifin, 2009). Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara bertetangga yang memiliki kedekatan pandangan, kesamaan budaya dan negara sekutu.

Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan yang erat sebagai negara dalam satu keluarga karena memiliki kesamaan etnis dan budaya antara kedua Negara (Darmawansyah et al., 2023). Kedekatan kawasan dan banyaknya persamaan kedua negara juga didukung oleh interaksi kedua negara yang sangat baik sehingga terjalin kerja sama di berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi maupun sosial, sehingga terjalin hubungan yang erat.

Hubungan pemerintahan, proses dan terjadinya perkawinan antara Indonesia dan Malaysia sering kali menandatangani perjanjian persahabatan Indonesia-Malaysia. Perjanjian ini memiliki arti penting dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara. Dalam hal ini, Indonesia dianggap sebagai kakak Malaysia karena Indonesia lebih awal meraih kemerdekaan, karena Indonesia sudah merdeka lebih awal (Darmawansyah et al., 2023). Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk kunjungan persahabatan dan perjanjian persahabatan juga telah dijajaki.

Membahas masalah ekonomi dan perdagangan, kerja sama stabilisasi harga bahan baku, kerja sama investasi timah dan masalah penyelundupan. Hingga pembahasan tentang hubungan sosial, agama, budaya, kebahagiaan, pendidikan dan bahasa. Dalam hal ini, kedua negara menjaga kepercayaan yang baik. Namun kesempatan tersebut dimanfaatkan Malaysia untuk membentuk federasi Malaysia dengan tujuan menyatukan provinsi Sabah dan Sarawak menjadi bagian dari Malaysia. Alasan yang disampaikan Indonesia adalah tujuan didirikannya federasi Malaysia adalah untuk mempererat kerja sama kedua negara di bidang politik dan ekonomi (Darmawan, 2005). Pada tanggal 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rachman mendirikan Federasi Malaysia di Singapura yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Sarawak, Brunei dan Sabah. Tengku Abdul Rachman yang akan membentuk federasi Malaysia dibawa oleh delegasi Malaysia ke Jakarta untuk berdiskusi dengan pihak Indonesia.

Menteri Luar Negeri Subandrio menyatakan tidak ada keberatan. Saat itu Indonesia masih sibuk dengan urusan Irian Barat dan tidak ingin menimbulkan masalah dengan negara tetangga (Pickleft, 1993). Setelah negosiasi pembentukan Federasi Malaysia, dicapai kesepakatan untuk meresmikan Federasi Malaysia yang mencakup Malaysia, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Dalam diskusi antara Tengku Abdul Rachman, Lew Kuan Yew dan Horald Mac Milan, tercapai kesepakatan: mendirikan federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Sarawak, Brunei dan Sabah. Pada bulan Juni 1962, dicapai kesepakatan dengan pemerintah Inggris untuk pembentukan resmi federasi Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1963 (Mackie, 1974). Inggris melihat ada peluang dan peluang untuk pembentukan federasi Malaysia dan pemerintah Indonesia. Saya belum siap melakukan itu. Menyadari tujuan sebenarnya yang dicita-citakannya, ia segera memprakarsai pembentukan federasi Malaysia.

Tentu saja hal ini mempunyai tujuan tersendiri seperti perluasan wilayah dan mempertahankan wilayah jajahan yang dikuasai Inggris yang terutama untuk kepentingan Malaysia. Sebelum terbentuknya federasi Malaysia, pemerintah Indonesia mengetahui bahwa federasi Malaysia bertujuan untuk menguasai wilayah Indonesia di Kalimantan Utara, khususnya Sabah dan Sarawak. Oleh karena itu, Indonesia menentang pembentukan federasi Malaysia yang telah dilakukan setelah

penyelesaian masalah Irian Barat , dan pertentangan ini adalah awal konflik, konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia Pada bulan Januari 1963, Soekarno mengumumkan bahwa ia menolak pembentukan Federasi Malaysia (Pickleft, 1993).

Soekarno menuding Federasi Malaysia sebagai negara boneka Inggris, serta neokolonialisme yang membahayakan Indonesia (Darmawan, 2005). Pulau Kalimantan di Indonesia dibagi menjadi empat pemerintahan pada tahun 1961 (Pickleft, 2007). Kerajaan Brunei dan dua bekas jajahan Inggris, Kalimantan Utara, umumnya dikenal sebagai Sabah, dan Sarawak, membentuk perbatasan utara. Setelah menarik sebagian wilayah jajahannya dari Asia Tenggara, Inggris berusaha mendirikan federasi Malaysia dengan menyatukan wilayah jajahannya di Kalimantan dan Semenanjung Malaya. Pemerintah Indonesia menolak inisiatif pengembangan FM. Menurut Presiden Soekarno, kemerdekaan Indonesia bisa terancam jika Malaysia menjadi boneka Inggris dan jika Indonesia bergabung dengan Malaysia hanya akan memperkuat dominasi dan kendali Inggris atas Asia Selatan. Ide ini juga ditentang oleh beberapa negara, khususnya Brunei, Singapura, Sarawak dan Sabah/Kalimantan Utara (Tarling, 1992).

Ada faksi pemberontak di Sabah (Kalimantan Utara) yang dipimpin oleh Azahari dari Partai Rakyat. Azahari menghubungi front sosialis di Kuala Lumpur (Mackie, 1974). Singapura mengunjungi Indonesia pada bulan November 1961 dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin sayap kiri. Partai Komunis Indonesia (PKI) mengeluarkan pernyataan pada tanggal 30 Desember 1961 dalam kunjungannya, menolak pembentukan Federasi Malaysia sebagai kaki tangan kolonialisme (Hindley, 1964). Bangsa Indonesia juga akan mendukung keadilan dan patriotisme sebagai perlawanan berani rakyat negeri ini. Kalimantan Utara (Sabah), Malaysia, Singapura, Sarawak, Brunei dan negara-negara tersebut menentang pembentukan Federasi Malaysia.

Dalam kunjungannya, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengeluarkan pernyataan pada tanggal 30 Desember 1961 yang mengutuk pembentukan Federasi Malaysia sebagai "keterlibatan dalam kolonialisme" dan menegaskan kembali bahwa rakyat Indonesia akan terus menjunjung tinggi keadilan dan patriotisme sebagai sebuah

bangsa (Hindley, 1964). Orang-orang pemberani, perlawanan dari rekan-rekan kita. Negara-negara tersebut, bersama Kalimantan Utara (Sabah), Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Brunei, menentang pembentukan Federasi Malaysia. Sikap politik agresif Presiden Soekarno ditunjukkan melalui berbagai pidato yang disampaikannya. Presiden Soekarno secara konsisten menyatakan bahwa kekuatan imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme adalah musuh bangsa Indonesia (Harold, 1978).

Salah satunya adalah Malaysia, produk sampingan dari neo-kolonialisme yang mengepung Indonesia dengan pangkalan militer imperialis saat adanya peperangan (Darmawansyah et al., 2023). Gagasan menyatukan wilayah suku Melayu, khususnya Malaysia, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah, dalam satu nama – Federasi Malaysia – menjadi biang konflik antara Indonesia dan Malaysia. Tengku Abdulrachman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama kali mengusulkan konsep tersebut pada 27 Mei 1961. Tengku Abdulrachman merupakan Perdana Menteri Malaysia yang dalam pidatonya mengatakan bahwa negaranya pada akhirnya akan mencapai kesepakatan dengan Inggris dan masyarakat Melayu.

Negara seperti Singapura, Kalimantan Utara, Brunei dan Sabah sehingga pada tahun dapat eksis sebagai satu negara kemudian yang pada tanggal 6 Juli 1963 menyampaikan bahwa Perdana Menteri Tengku Abdulracman naik pesawat menuju London setelah menerima laporan dari utusannya. Wakil Perdana Menteri Tun Abdulrazak hanya perwakilan Malaysia, Singapura, Sarawak dan Sabah yang berwenang menandatangani perjanjian federasi Malaysia pada 9 Juli 1963 yang selanjutnya menurut DEPPEN Republik Indonesia Glora Konfrontasi Mengganyang Malaysia (Tarling, 1992).

Peristiwa ini diprotes oleh pemerintah Indonesia dengan alasan pembentukan Federasi Malaysia adalah bagian dari neo-kolonialisme. Sesuai sumpahnya, Indonesia bersumpah menolak kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk, oleh karena itu Indonesia sangat menentangnya. Tentu saja hal ini sejalan dengan sikap anti kolonial dan anti imperialis yang tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 yang dengan jelas menyebutkan bahwa Indonesia menegaskan bahwa setiap bangsa berhak merdeka. Selain itu, pasal pembuka UUD 1945

menegaskan kembali perlunya memberantas kolonialisme dalam segala manifestasinya. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia semakin tidak menerima pembentukan negara federasi Malaysia. Presiden Soekarno menyatakan di depan media Asia-Afrika bahwa masyarakat Sarawak, Brunei, dan Sabah sedang memperjuangkan hak hak mereka sebagai anggota kekuatan baru yang membenci eksploitasi manusia.

Konfrontasi ini dipicu oleh penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang digagas oleh Inggris. Indonesia menganggap Federasi Malaysia ini sebagai perpanjangan dominasi kolonial Inggris di wilayah Asia Tenggara. Kebijakan "Ganyang Malaysia" Untuk menghalangi pembentukan Federasi Malaysia, Indonesia meluncurkan kebijakan "Ganyang Malaysia" yang mencakup berbagai upaya, yaitu: Operasi militer, dengan mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan infiltrasi dan penyerangan di perbatasan Malaysia, Propaganda, dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan resmi pemerintah Indonesia yang menolak dan mengecam pembentukan Federasi Malaysia. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji “Dampak Konfrontasi Indonesia dan Malaysia Terhadap Ekonomi Tahun 1963-1966”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah apa sajakah Dampak Konfrontasi Indonesia dan Malaysia terhadap Ekonomi Tahun 1963-1966?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak dari terjadinya konfrontasi Indonesia dan Malaysia Terhadap Ekonomi Tahun 1963-1966. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sangat menantang selama era demokrasi terpimpin. Indonesia berselisih dengan Malaysia akibat taktik agresif Presiden Sukarno sehingga dapat menambah wawasan dan

pengetahuan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi muda juga sangat perlu memahami sejarah Indonesia dan nilai positif yang bisa dipetik dari ilmu ini.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat/kegunaan penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1.4.1 Secara teoritis

Dalam pandangan teori realisme, konfrontasi ini bisa dianggap sebagai upaya Indonesia untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Sukarno memandang pembentukan Malaysia sebagai proyek neo-kolonialisme yang didukung oleh Inggris dan khawatir bahwa keberadaan Malaysia akan mengancam dominasi Indonesia di kawasan tersebut. Menurut teori ini, negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka, dan Indonesia melihat Malaysia sebagai ancaman potensial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Menambah ilmu pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah yang berkaitan dengan tema pembahasan.
- b. Menambah pemahaman tentang Konfrontasi Indonesia dan Malaysia serta dampak ekonominya.
- c. Memberikan sumbangan terhadap penelitian dan penulisan sejarah tentang Konfrontasi Indonesia dan Malaysia serta dampak ekonominya.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Bagi Universitas Lampung

Menambah khazanah karya ilmiah di bidang sejarah ekonomi dan hubungan internasional, memperkuat reputasi Unila sebagai lembaga pendidikan yang mendorong kajian kritis atas peristiwa sejarah nasional dan dampaknya terhadap

pembangunan, menjadi salah satu referensi bagi penelitian lanjutan atau pengembangan kurikulum berbasis isu sejarah dan ekonomi kontemporer.

b. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan bacaan dan sumber pengetahuan tentang Dampak Konfrontasi Indonesia dan Malaysia Terhadap Ekonomi Tahun 1963-1966, mendukung pengembangan materi ajar dalam mata kuliah Sejarah Indonesia, Sejarah Ekonomi, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

c. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis akan kesejarahan yakni tentang Dampak Konfrontasi Indonesia dan Malaysia Terhadap Ekonomi Tahun 1963-1966, meningkatkan kemampuan dalam menelusuri sumber sejarah dan data ekonomi secara ilmiah dan menjadi bekal akademik dan intelektual untuk melanjutkan studi, menjadi pendidik sejarah, atau peneliti bidang sosial-humaniora.

d. Bagi Pembaca

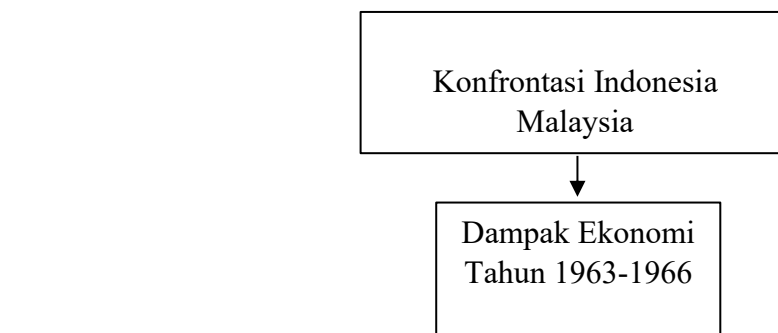
Memperluas pengetahuan tentang Dampak Konfrontasi Indonesia dan Malaysia Terhadap Ekonomi Tahun 1963-1966, memberikan pemahaman tentang bagaimana konflik politik luar negeri dapat mempengaruhi ekonomi domestik, menambah wawasan sejarah nasional yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi.

1.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai dampak ekonomi dari konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada masa era Perang Dingin, Konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966 merupakan konflik politik dan militer yang dipicu oleh penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia memandang pembentukan Malaysia sebagai bentuk "neokolonialisme" yang mengancam integritas kawasan Asia Tenggara. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga membawa konsekuensi yang signifikan terhadap aspek ekonomi Indonesia. Secara teori, konflik antarnegara, terutama yang bersifat

militer, berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi. Alokasi anggaran negara akan lebih banyak difokuskan pada sektor pertahanan, sementara sektor produktif lainnya seperti pertanian, industri, dan perdagangan bisa mengalami stagnasi. Dalam konteks Konfrontasi Indonesia-Malaysia, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran besar untuk pembiayaan militer, mobilisasi pasukan, serta operasi-operasi khusus di perbatasan Kalimantan dan wilayah lainnya. Konfrontasi ini juga menyebabkan terganggunya hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara Persemakmuran seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, yang merupakan mitra dagang utama pada saat itu. Sanksi tidak langsung dan pengurangan akses terhadap pasar internasional menyebabkan menurunnya ekspor Indonesia, sehingga memengaruhi pendapatan negara. Selain itu, situasi ekonomi dalam negeri turut memburuk akibat inflasi yang tinggi, defisit anggaran, dan kemunduran sektor industri. Dalam kerangka inilah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dari konfrontasi yang dijalankan Indonesia selama periode 1963-1966. Fokus penelitian diarahkan pada perubahan alokasi anggaran negara, fluktuasi ekspor-impor, inflasi, serta dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan menganalisis data historis dan sumber primer-sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana konflik politik internasional dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.

1.6 Paradigma Penelitian



Keterangan

—————→ : Garis Hubung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dampak Konfrontasi Indonesia Malaysia

Konfrontasi Indonesia-Malaysia memiliki dampak yang nyata, salah satunya adalah terjadinya perang urat saraf (psywar). Menurut Sahul Hamid Bin Mohamed Maiddin (2010), perang urat saraf adalah bentuk kampanye yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan emosi rakyat tanpa melibatkan tindakan militer secara langsung. Perang ini menggunakan berbagai strategi, seperti propaganda melalui penyiaran radio, pengedaran risalah, tayangan film, hingga bantuan kepada masyarakat lokal. Kementerian Penerangan Malaysia memegang peran penting dalam merancang dan melaksanakan strategi ini selama konfrontasi. Perang urat saraf menjadi alat untuk mencapai tujuan politik dan militer dengan fokus pengaruh psikologis terhadap masyarakat (Aronson, 1991).

Selain itu, konfrontasi ini berdampak pada perekonomian Indonesia yang mengalami defisit. Pada masa tersebut, Indonesia baru saja menyelesaikan perjuangan membebaskan Irian Barat, yang memerlukan pembiayaan besar. Konflik dengan Malaysia semakin membebani anggaran negara. Menurut jurnal *Konfrontasi Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia*, perselisihan ini menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan, memperburuk kondisi keuangan negara (Mardiyah, 2019).

Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 60-an cukup mendapat perhatian dunia. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Alasannya, karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya kemudian, telah ditempuh satu upaya penyelesaian berupa perundingan-perundingan antara kedua negara. Namun upaya ini gagal dan konfrontasi makin meruncing dengan diproklamirkannya negara baru ini pada 16

September 1963. Usaha perdamaian yang ditempuh kemudian gagal pula karena ketidaksepakatan kedua belah pihak (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1970). Dapat dikatakan bahwa setelah KTT Tokyo 1964 mendapatkan usaha untuk berdamai terhenti sama sekali. Sementara itu, dari dalam negeri muncul kelompok-kelompok yang tidak menginginkan konfrontasi terus dilanjutkan. Mereka berhasil mengadakan kontak satu sama lain untuk merundingkan upaya perdamaian.

Dari pihak Indonesia, inisiatif ini diambil oleh pihak ABRI. Konfrontasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh ABRI. Penyelesaian konfrontasi membutuhkan sesuatu yang membuatnya kelihatan legal di mata hukum Internasional. Pada tahap inilah, Departemen Luar Negeri dibutuhkan. Deplu dan militer bekerjasama agar tujuan penyelesaian konfrontasi dapat tercapai. Pihak militer membutuhkan Deplu sebagai wakil resmi pemerintah yang menangani urusan luar negeri dan sebaliknya serta pihak Deplu membutuhkan pihak militer karena merekalah yang lebih mengenal situasi (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1970).

Dari segi politik dan internasional, konfrontasi ini dipicu oleh Presiden Soekarno yang melihat pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk kolonialisme Inggris. Hal ini memicu eskalasi konflik dan aksi demonstrasi anti-Indonesia. Setelah kudeta G30S/PKI, kepemimpinan Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto yang memulai proses perdamaian. Pada 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia menandatangani kesepakatan damai, dan Indonesia secara resmi mengakui Malaysia. Konfrontasi ini berakhir dengan kekalahan Indonesia, dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya militer Indonesia dibandingkan dukungan Inggris dan sekutu terhadap Malaysia. Peralihan kekuasaan ke Soeharto turut mempercepat proses perdamaian, mengakhiri kebijakan "Ganyang Malaysia" yang sebelumnya didukung oleh Soekarno dan PKI.

2.2 Dampak Ekonomi Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Indonesia dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks dalam tahun 1963-1965, masalah-masalah pokok tersebut adalah pertama meningkatnya inflasi yang berakibat naiknya harga pangan, terutama beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, kedua impor beras juga semakin

meningkat yang mengakibatkan berkurangnya cadangan devisa untuk pembangunan (Suroso, 1997). Konfrontasi ini berdampak terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah, yang mengabaikan kaidah-kaidah ekonomi. Hal ini mengakibatkan keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami keterpurukkan, defisit anggaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan terjadinya inflasi yang tinggi. Selain itu bahan pokok juga mengalami kenaikan terutama beras.

Masa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1963 berimbas ke perekonomian Indonesia. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Petani sudah tidak tertarik untuk menghasilkan komoditi perkebunan seperti karet, gambir dan kelapa. Konfrontasi membuat para petani kehilangan market (pemasaran) terhadap bahan baku produksi, banyak para petani tidak dapat menjual hasil alamnya ke Malaysia sehingga kehidupan perekonomian masyarakat petani menjadi merosot. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, hasil tangkapan ikan tersebut dijual kepada penampungan ikan, penampungan ikan ini biasanya orang Cina yang di kenal dengan Toke/Taoke, selama konfrontasi banyak para pekerja yang beralih profesi seperti dari guru menjadi nelayan, pedagang menjadi petani, dan sebagainya karena hal itu merupakan pekerjaan sampingan mereka, lalu hasil laut tersebut mereka jual dengan taoke tersebut atau dengan cara barter ikan dengan bahan pokok gula, beras, teh, kopi dan lain sebagainya (Sukarman, 2018).

Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pedagang, perekonomian yang terputus akibat adanya konfrontasi membuat pedagang harus memutar otak dengan cara mencari pekerjaan alternatif karena mereka tidak boleh menjual atau membeli barang-barang dari Malaysia, karena selama konfrontasi barang-barang diawasi secara ketat. Kehidupan ekonomi bagi pegawai pemerintah pada masa konfrontasi sama dengan kondisi masyarakat secara umumnya yaitu sulit bahkan diantara mereka melakukan pekerjaan ganda seperti menjadi nelayan, buruh, petani dan lain sebagainya (Sukarman, 2018).

Konfrontasi Indonesia-Malaysia, yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966, merupakan periode ketegangan antara kedua negara yang dipicu oleh berbagai

faktor politik dan territorial. Dampak ekonomi dari konfrontasi ini cukup signifikan dan dapat dilihat dari beberapa aspek (Saleh, 2000), adalah sebagai berikut:

1. Gangguan Perdagangan

Konfrontasi menyebabkan penurunan volume perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, yang sebelumnya memiliki hubungan dagang yang cukup baik. Kebijakan proteksionis di kedua negara mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Kedua negara memberlakukan pembatasan terhadap barang-barang tertentu, yang berdampak pada rantai pasokan dan distribusi barang.

2. Investasi Asing

Ketegangan politik dan konflik militer membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di kedua negara, terutama di wilayah perbatasan. Hal ini menghambat pertumbuhan sektor industri dan infrastruktur. Banyak investor memilih untuk mengalihkan investasi mereka ke negara lain yang dianggap lebih stabil secara politik.

3. Biaya Militer

Untuk menghadapi konfrontasi, Indonesia meningkatkan anggaran pertahanannya, yang mengalihkan dana dari sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat berdampak negatif pada pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Konflik militer menyebabkan kerusakan infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang terdampak.

4. Dampak Sosial dan Kemanusiaan

Konflik menyebabkan perpindahan penduduk di daerah perbatasan, yang berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Pengungsi sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Masyarakat yang tinggal di daerah konflik mengalami ketidakpastian ekonomi, yang berdampak pada penghasilan dan mata pencaharian mereka.

5. Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik yang tegang antara Indonesia dan Malaysia menghambat kerja sama regional dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Konfrontasi mempengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara, termasuk keterlibatan mereka dalam organisasi regional seperti ASEAN.

Dampak ekonomi dari konfrontasi Indonesia-Malaysia mencakup gangguan perdagangan, menurunnya investasi asing, peningkatan biaya militer, serta dampak sosial yang signifikan. Meskipun konfrontasi tersebut telah berakhir, dampaknya masih dapat dirasakan dalam hubungan bilateral antara kedua negara hingga saat ini. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk terus menjalin kerja sama dan memperkuat hubungan diplomatik guna mendorong stabilitas ekonomi di kawasan.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung antara tahun 1963 hingga 1966 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian kedua negara. Beberapa teori yang diangkat dalam literatur terkait dampak ekonomi dari konfrontasi tersebut meliputi (Susastro, 2005), adalah sebagai berikut.

1. Gangguan Perdagangan Bilateral: Embargo perdagangan yang diberlakukan Indonesia terhadap Malaysia menghentikan ekspor komoditas penting seperti karet dan timah. Hal ini tidak hanya merugikan Malaysia yang mengalami kekurangan bahan baku, tetapi juga Indonesia yang kehilangan pendapatan ekspor signifikan.
2. Penurunan Investasi Asing dan Ketidakstabilan Ekonomi: Ketegangan politik selama konfrontasi menciptakan iklim ketidakpastian yang membuat investor asing menunda atau membatalkan investasi di kedua negara. Di Indonesia, situasi ini diperparah dengan inflasi tinggi dan penurunan nilai mata uang.
3. Dampak pada Ekonomi Lokal: Di wilayah perbatasan seperti Tanjung Balai Karimun, konfrontasi menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan dan pendapatan masyarakat lokal. Kebijakan moneter yang melarang penggunaan dolar Singapura dan Malaysia digantikan dengan Rupiah Kepulauan Riau, yang berdampak pada perekonomian setempat.
4. Perang Urat Saraf dan Defisit Ekonomi: Selain konflik militer, konfrontasi juga diwarnai oleh perang urat saraf yang meningkatkan ketegangan. Indonesia

mengalami defisit ekonomi akibat biaya konfrontasi yang tinggi, terutama setelah upaya pembebasan Irian Barat.

Secara keseluruhan, konfrontasi Indonesia-Malaysia memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana ketegangan politik dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Konflik Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia (1963-1966) memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana konflik ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia (Ahmad, 2010), adalah sebagai berikut.

1. Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

a. Penurunan Investasi Asing

- 1) Keraguan Investasi: Ketidakpastian politik dan keamanan selama konflik menyebabkan banyak investor asing menarik diri atau menunda investasi mereka di Indonesia. Hal ini mengakibatkan berkurangnya arus modal yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi.
- 2) Krisis Ekonomi: Penurunan investasi asing berkontribusi pada krisis ekonomi yang lebih besar, termasuk inflasi tinggi dan defisit anggaran.

b. Gangguan Perdagangan

- 1) Embargo dan Pembatasan: Konflik menyebabkan pembatasan perdagangan dengan Malaysia dan negara-negara lain, mengganggu rantai pasokan dan distribusi barang. Hal ini berdampak negatif pada sektor-sektor yang bergantung pada perdagangan internasional.
- 2) Kerugian Sektor Pertanian: Sektor pertanian, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, mengalami kerugian akibat ketidakstabilan di daerah perbatasan.

c. Alokasi Sumber Daya untuk Militer

Peningkatan Anggaran Pertahanan: Pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran untuk militer untuk menghadapi konfrontasi, yang mengalihkan sumber daya dari sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menghambat pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang.

d. Krisis Sosial

Pengungsi dan Ketidakpastian: Masyarakat di daerah perbatasan mengalami ketidakpastian dan perpindahan penduduk, yang berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi.

2. Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Malaysia

a. Stabilitas Ekonomi Relatif

- 1) Dukungan Internasional: Malaysia mendapatkan dukungan dari Inggris dan negara-negara Barat, yang membantu menjaga stabilitas politik dan ekonomi selama periode konflik. Ini memberikan rasa aman bagi investor.
- 2) Pertumbuhan Sektor Perkebunan: Meskipun ada ketegangan, sektor perkebunan (seperti karet dan minyak sawit) tetap berfungsi dengan baik, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

b. Penarikan Investasi Terbatas

Minimnya Dampak Negatif: Meskipun terdapat penurunan minat investasi asing, dampaknya tidak sebesar di Indonesia. Malaysia masih mampu menarik beberapa investasi asing karena dianggap sebagai lokasi yang lebih stabil dibandingkan dengan Indonesia.

c. Percepatan Industrialisasi Pasca-Konflik

- 1) Pembangunan Infrastruktur: Setelah konflik berakhir, Malaysia dapat memanfaatkan momentum untuk mempercepat industrialisasi dan pembangunan infrastruktur, yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

- 2) Kebijakan Ekonomi Terencana: Kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terencana membantu Malaysia tumbuh pesat pada dekade-dekade berikutnya.

d. Keberhasilan dalam Menarik Investasi Asing

Peningkatan Daya Tarik Investasi: Setelah konflik berakhir, Malaysia berhasil menarik kembali minat investor asing dengan kebijakan liberalisasi ekonomi dan kemudahan berinvestasi.

Secara keseluruhan, konflik Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengakibatkan penurunan investasi asing, gangguan perdagangan, dan alokasi sumber daya untuk militer. Sebaliknya, Malaysia relatif lebih berhasil mempertahankan stabilitas ekonominya selama konflik, dengan sektor-sektor tertentu tetap tumbuh dan kebijakan pembangunan yang efektif pasca-konflik. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana faktor-faktor politik dan dukungan internasional dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode ketegangan.

2.3 Latar Belakang Sejarah Perang Dingin

Perang Dingin terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang ini dimulai karena kecurigaan antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat sebagai pemimpin blok barat dan Uni Soviet sebagai pemimpin blok timur. Kecurigaan ini muncul karena kedua negara tersebut termasuk dalam lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang diberi hak veto, yang diharapkan mampu menjaga perdamaian dunia. Namun, kenyataannya, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak saling mempercayai dan merasa saling terancam. Kedua negara ini kemudian terlibat dalam berbagai konflik, dengan menggunakan negara-negara ketiga sebagai sarana untuk menyebarkan pengaruh mereka. Amerika Serikat memperluas liberalisme melalui perdagangan dan alasan hak asasi manusia, sedangkan Uni Soviet menyebarkan komunisme melalui pemberian senjata serta memanfaatkan isu anti-imperialisme dan anti-kolonialisme (Salamah, 2008). Perang Dingin adalah situasi di mana dunia berada dalam ketakutan akan perang nuklir.

Meski tidak ada peperangan terbuka, ketegangan tetap terasa, menciptakan kondisi "damai tapi tidak benar-benar damai" karena kedua belah pihak siap memicu konflik nuklir kapan saja. Konflik ideologi dan politik berdampak pada persaingan militer antara blok-blok kekuatan global. Seperti persaingan perusahaan di pasar yang sama, kedua pihak berusaha mencari metode terbaik untuk menguasai "pasar" dan memperoleh keuntungan. Uni Soviet berhasil mendapatkan pengaruh di Eropa Timur, yang mendorong Amerika Serikat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut pengaruh Soviet di Eropa, sering disebut "Finlandisasi". Sebagai tanggapan, AS membentuk aliansi NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) pada tahun 1954, serta menjalin aliansi dengan Cina Nasionalis, ANZUS (1951), SEATO (1954), dan membuat perjanjian dengan Iran, Turki, dan Pakistan (McNamara, 1989: 46). Menyikapi langkah AS, Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa (*Warsaw Treaty Organization*) pada tahun 1955, mendirikan Cominform (Biro Informasi Komunis), dan memperkuat inovasi militer dengan meluncurkan satelit Sputnik pada tahun 1957. Negara-negara dunia ketiga menjadi ajang persaingan antara kedua kekuatan besar ini, dan beberapa di antaranya memilih untuk tidak terlibat dalam blok ideologis mana pun. Dari sini lahir gerakan Non-Blok, yang ditandai dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama di Beograd pada tahun 1961 (Sastro, 2002).

2.4 Latar Belakang Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Pada tahun 1961, Pulau Kalimantan, yang merupakan bagian dari Indonesia, dibagi menjadi empat wilayah administrasi. Di sebelah utara, terdapat Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris, yaitu Sarawak dan Borneo Utara, yang kini dikenal sebagai Sabah. Sebagai bagian dari penarikan koloni Inggris di Asia Tenggara, Inggris berusaha mengintegrasikan koloni-koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya melalui pembentukan Federasi Malaysia. Masing-masing negara bagian (Brunei, Singapura, Sarawak dan Sabah/Kalimantan Utara) memiliki kelompok sayap kiri yang menentang gagasan ini. Di Sabah (Kalimantan Utara) terdapat kelompok pemberontak dibawah pimpinan Azahari dari partai rakyat. Azahari mengunjungi Kuala Lumpur dan mengadakan kontak dengan frontsosialis.

Singapura menemui para pemimpin sayap kiri dan pada November 1961 mengunjungi Indonesia. Berkaitan dengan kunjungan tersebut Partai Komunis Indonesia (PKI), pada 30 Desember 1961 mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembentukan Federasi Malaysia, karena dipandang sebagai “antek kolonialisme” dan menandaskkan bahwa rakyat Indonesia akan membantu keadilan dan semangat aptriotik, serta menentang usaha pembentukan Federasi Malaysia (Santoso, 2003).

Pada tanggal 8 Desember 1962 Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) melakukan pemberontakan di Brunei. Mereka memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Utara yang terdiri dari Brunei, Serawak, dan Sabah dan juga mencoba menangkap Sultan Brunei, namun hal ini berhasil digagalkan. Atas pernyataan kemerdekaan Kalimantan Utara tersebut, PM Malaysia Tengku Abdul Rahman menuding Indonesia sebagai penyebabnya (Arifin, 2009). Meskipun Azahari melakukan kontak dengan Wakil Presiden Filipina, Emmanuel Pelaez, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Filipina, dan tidak melakukan kontak dengan Indonesia, pemerintah Indonesia secara tegas menolak tuduhan tersebut (Nugroho, 2004).

Presiden Soekarno menegaskan bahwa barang siapa yang tidak mendukung revolusi Kalimantan Utara dan menentang Malaysia adalah pengkhianat. Selain itu Soekarno juga mencurigai bahwa pembentukan Federasi Malaysia adalah tindakan kekuatan-kekuatan neokolonialisme yang menjadi bagian dari Gerakan pengepungan terhadap Indonesia. Menjelang pembentukan federasi, Tengku Abdul Rahman mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap Filipina dan Indonesia untuk menyelesaikan krisis ini secara damai. Pertemuan presiden Filipina, dengan Malaysia menghasilkan persetujuan untuk mengadakan pertemuan segitiga antar ketiga negara (Rahardjo, 2005).

Pertemuan pertama diadakan di Tokyo, Jepang. Pada pertemuan ini disepakati agar Indonesia Malaysia tetap memelihara persahabatan. Untuk merumuskan lebih lanjut hasil pertemuan di Tokyo, diadakan lagi pertemuan para menteri luar negeri (Menlu) tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Pertemuan ini diadakan di Manila, Filipina dari 7 sampai 11 Juni 1963. atas dasar hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat di wilayah-wilayah yang hendak digabungkan, dan ditentukan

oleh otoritas yang bebas dan tidak berpihak, yaitu Sekretaris Jenderal PBB. Pertemuan ini diperkuat dengan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi antara Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman, Presiden Macapagal dan Presiden Soekarno yang dilangsungkan di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 (Haryono, 2007).

Pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa Federasi Malaysia akan terbentuk pada 16 September 1963. Proklamasi itu dilakukan sebelum misi PBB menyampaikan laporan peninjauannya, dan pemerintah Indonesia menganggap ini sebagai pelanggaran atas martabat PBB dan juga sebagai pelanggaran atas Pernyataan Bersama Manila yang secara tegas menetapkan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak haruslah terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Pada 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dalam waktu empat hari Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, yang menyangkut hampir separuh dari ekspor Indonesia (Pickleft, 2007).

Presiden Soekarno pada tanggal 25 September 1963 mengumumkan secara resmi bahwa akan mengganyang Malaysia. Soekarno menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya menentang tapi juga memerangi dan akan menghancurkan Malaysia. Presiden Soekarno beranggapan bahwa Malaysia adalah neo-kolonialisme, Malaysia adalah proyek Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. (Departemen Penerangan RI. 1964.) Malaysia dibentuk oleh Inggris untuk mengepung Indonesia dan Cina yang merupakan dua kekuatan yang menentang kolonialisme dan imperialisme dalam berbagai bentuk (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1964).

Indonesia memandang pembentukan Malaysia sebagai bentuk neokolonialisme yang dapat mengancam negara tersebut. Pandangan ini, yang diutarakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), mempengaruhi Presiden Soekarno untuk mengambil sikap konfrontasi. Sejak tahun 1950-an, Singapura telah berkeinginan bergabung dengan Federasi Tanah Melayu. Lee Kuan Yew dan partainya, Partai Aksi Rakyat (PAP), mendukung langkah ini karena khawatir dengan pengaruh kuat partai-partai

kiri, dan ia ingin mempertahankan posisinya. Pada Desember 1961, Majelis Legislatif Singapura menyetujui usulan tersebut (Adam, 2010).

Latar belakang dari peristiwa konfrontasi menunjukkan bagaimana kepentingan nasional masing-masing negara berusaha mencari kambing hitam dan membenarkan tindakan mereka, yang akhirnya menciptakan oposisi biner. Hal ini menyebabkan narasi sejarah dalam buku teks menjadi hitam-putih. Pola hitam-putih ini dapat menimbulkan konflik yang berujung pada kebencian terhadap peristiwa masa lalu. Jika dibiarkan, situasi ini tidak akan menguntungkan, terutama dalam upaya membangun kesadaran nasional.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia bukan hanya sekadar konflik politik atau militer, melainkan juga mencerminkan persaingan ideologi dan kepentingan strategis antara kedua negara. Indonesia, di bawah kepemimpinan Soekarno, melihat pembentukan Malaysia sebagai ancaman terhadap posisi regionalnya serta sebagai upaya untuk memperkuat pengaruh Barat di Asia Tenggara. Di sisi lain, Malaysia memandang integrasi negara-negara di Semenanjung Malaya, termasuk Singapura, sebagai langkah penting dalam memperkuat pertahanan dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik kawasan. Perbedaan pandangan ini diperburuk oleh kepentingan internal masing-masing negara, seperti ketakutan Singapura terhadap pengaruh komunis dan keinginan Soekarno untuk mempertahankan pengaruh nasionalisnya. Dalam konteks ini, konfrontasi lebih dari sekadar ketegangan antar negara, tetapi juga mencerminkan kompleksitas politik, ekonomi, dan ideologis di Asia Tenggara pada masa itu.

Terjadi perselisihan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1966. Bentrokan ini terjadi menandai dimulainya konflik antara Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, Malaysia dipandang oleh Indonesia sebagai pihak yang melayani kepentingan Inggris di Asia Tenggara. dengan memaksa Brunei, Sarawak, dan Sabah bergabung dengan Federasi Malaysia sebagai pembalasan terhadap Indonesia. Ia melakukan tawar-menawar dengan Subandrio, Wakil Menteri Pertama II Republik Indonesia Luar, jika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Hasil negosiasi dengan Marsekal Chen Yi, Wakil Perdana Menteri Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri.

Menurut Bank Indonesia pada periode 1959-1966 dapat menandakan perjuangan Indonesia melawan Malaysia akan mendapat dukungan penuh dari RRT. Pada tanggal 25 Januari 1965, Subandrio membahas gagasan Inggris membom Indonesia dalam perundingan. Dari segi politik luar negeri, Indonesia lebih cenderung mendukung blok timur pada era Demokrasi Terpimpin. Kedekatan Indonesia dengan Rusia dan China memberikan tekanan pada hubungan Indonesia dengan negara-negara di blok barat. Pemerintah kemudian mengambil keputusan keluar dari PBB, Bank Dunia, dan IMF pada 17 Agustus 1965, dengan alasan semangat kemerdekaan dan revolusi. Karena penarikan tersebut, terdapat hutang sebesar \$61,9 juta hingga \$63,5 juta kepada IMF. Jumlah ini, yang akan dibayar kembali dalam sepuluh kali pembayaran setiap enam bulan mulai tanggal 17 Februari 1966, sudah termasuk bunga utang. (Saleh, 2000).

Defisit anggaran belanja pemerintah ditutup karena kesalahan pengelolaan pemerintah disebabkan oleh kesalahan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Pengeluaran-pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua golongan besar, yakni Perekonomian Indonesia Dalam Prespektif Waktu. Pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan yang sifatnya sulit untuk dikurangi (Susastro, 2005). Hal ini menyebabkan inflasi berkelanjutan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran pembangunan yang bersifat non-pembangunan ataupun pengeluaran yang tidak menambah jumlah produksi secara langsung bersumber pengeluaran yang sangat besar.

Kesepakatan Manila, juga dikenal sebagai Aliansi Malaysia, Filipina, dan Indonesia, atau MAPHILINDO, adalah kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebelum konflik terjadi. Kontrak itu ditandatangani oleh Presiden Macapagal Aroyo Food Filipina, Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman, dan Presiden Ir. Sukarno. Saat itu, Malaysia sengaja mengingkari perjanjian dengan tetap mendukung Inggris. Akibatnya, Indonesia memandang Malaysia telah melanggar perjanjian dan khawatir bahwa pembentukan Federasi Malaya yang dilakukan Inggris dengan gaya kolonial baru yang dikenal sebagai "Neo kolonialisme" dapat membahayakan kemerdekaan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio, menyuarakan pendapat negatif terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Belakangan, Jenderal Nasution mengirimkan pasukan melintasi perbatasan untuk memperkuat pernyataan tersebut. Sarawak. Akhirnya pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan dengan Malaysia. Namun, ada juga pengunjung rasa asal Malaysia di Kuala Lumpur pada hari itu, yang menyatakan sentimen anti-Indonesia. Hal ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada saat itu dan pengiriman pasukan tidak sah untuk menyerang Malaysia.

Sukarno presiden Indonesia saat itu, marah atas tindakan aparat anti-Indonesia di Malaysia yang menginjak-injak lambang negara. Sukarno akhirnya melakukan pembalasan dengan menggunakan gerakan ini. ditetapkan sebagai Malaysia Ganyang. Operasi militer di Kalimantan telah menimbulkan permasalahan bagi keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Akhirnya pada tahun 1964, Indonesia meluncurkan serangan yang dikenal dengan nama Komando Rakyat Dwi (DWIKORA) untuk mencegah terbentuknya Federasi Malaysia.

Konflik antara Indonesia dan Malaysia merupakan konfrontasi langsung yang terjadi di kawasan yang sama yaitu Asia Tenggara yang menjelaskan alasannya. Meskipun Malaysia melanggar Perjanjian Manila (Manila Accord), tidak terjadi perang teritorial (regional) di Asia Tenggara sebagai akibat dari situasi tersebut. Namun, patuhlahMeningat Indonesia merupakan negara dengan Partai Komunis terbesar ketiga di luar wilayah komunis setelah Uni Soviet dan RRT, penulis menyatakan bahwa konfrontasi tersebut diakibatkan oleh blok Timur dan Barat yang memainkan politik domino. Penulis secara khusus menyebutkan bahwa Inggris dan Amerika di blok Barat khawatir jika Indonesia bergabung dengan Blok Timur, maka hal itu akan terjadi.

Ada beberapa faktor berbeda yang menyebabkan perbedaan konvensi antara Malaysia dan Indonesia, Faktor ini juga bisa berasal dari luar maupun dalam (Djoened, 2010). Berikut faktor-faktor yang berasal dari Indonesia:

1. Faktor internal Indonesia

- 1) PKI mempunyai sejarah yang kuat dalam menentang ideologi dan politik konfrontatif.
- 2) NASAKOM, yang diciptakan oleh Ir. Sukarno.
- 3) Presiden Soekarno ingin memasukkan Amerika Serikat ke dalam wilayah NKRI.
- 4) TNI-AD mendukung penggunaan politik konfrontasi sebagai taktik untuk mengimbangi PKI.
- 5) Protes anti-Indonesia di Malaysia membuat marah Sukarno dengan menginjak lambang negara Indonesia, dan Soekarno menanggapi dengan memulai kampanye Ganyang Malaysia sebagai balasannya.
- 6) Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dan bisnis dengan Malaysia.
- 7) Karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar, adanya penutupan perekonomian menyebabkan terjadinya perdagangan ilegal.

2. Faktor eksternal Indonesia:

- 1) Sehubungan dengan penunjukan Malaysia selanjutnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB menyusul upaya menjadi anggota PBB.
- 2) Keamanan PBB. Hal ini kemudian memaksa Indonesia keluar dari forum PBB.
- 3) Kesepakatan Manila yang disetujui oleh Filipina, Indonesia, dan tiga kawasan lainnya telah dilanggar oleh Malaysia.
- 4) Federasi Malaysia tidak dibentuk atas undangan Indonesia ke Malaysia.
- 5) Pengaruh kemauan Amerika dan Inggris terhadap sentimen politik local 6. Politik domino dipraktikkan di Asia Tenggara.

2.5 Jalannya Konfrontasi Indonesia Malaysia

Tanggal 28 April 1964 diadakan sidang Komando Operasi Tertinggi (KOTI) di Istana Merdeka, dimana KOTI dibentuk pada 19 Juli 1963. KOTI mempunyai tugas pokok yaitu operasi pengamanan terhadap pelaksanaan program pemerintah pada umumnya, khususnya dibidang konfrontasi terhadap unsur-unsur kolonialisme

ataupun imperialism dalam segala manifestasinya serta pengamanan terhadap pelaksanaan program ekonomi.

Pada pidatonya, Amanat-komando Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia di depan Istana Merdeka, Jakarta 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengatakan *“Malaysia adalah bahaya, membahajai, membahayakan Revolusi Indonesia. Karena itu maka kita serempak seia-sekata, Malaysia harus kita ganjang habis-habisan”* (Amanat-komando Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.1964). Presiden Soekarno menjelaskan maksud utama Dwikora sebenarnya bukan bermusuhan dengan serumpun bangsa Melayu, melainkan untuk mengusir Inggris (Imperialisme/Kolonialisme) dari wilayah Asia oleh Melayu sendiri dan membangkitkan semangat nasionalisme, militansi dan patriotisme.

Operasi militer dilakukan sampai ke Singapura dan daratan Semenanjung Malaya. Pada 30 Mei 1964 diberangkatkan satu batalyon sukarelawan Dwikora ke daerah perbatasan. Disepanjang perbatasan Kalimantan, terjadi peperangan perbatasan, pasukan Indonesia dan pasukan tak resminya mencoba menduduki Serawak dan Sabah. Pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di wilayah Tawao, pasukan Indonesia berhasil menewaskan delapan tentara Inggris dan mencederai lainnya.

Malaysia kemudian mendesak PBB untuk bertindak tegas kepada Indonesia. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Subandrio mengemukakan fakta bahwa Malaysia juga melakukan pelanggaran terhadap Indonesia. Di lain pihak, Tengku Abdul Rahman menyatakan bersedia untuk melakukan perundingan dengan Indonesia, namun dengan syarat bahwa Indonesia harus memberi pengakuan kepada Malaysia, mengakhiri politik konfrontasi, menarik mundur tentara Indonesia dari Sabah dan Serawak, dan mengangkat negara netral sebagai juri. Indonesia akhirnya menyetujui penghentian tembak-menembak serta akan berusaha menyelesaikan masalah Malaysia dengan jalan musyawarah. Namun pihak Malaysia menghendaki agar penghentian tembak-menembak disusul dengan penarikan para sukarelawan Indonesia dari Kalimantan Utara (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1965).

Usaha yang dilakukan Inggris untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, membuat Presiden Soekarno geram. Klimaksnya pada 7 Januari 1965 dalam pidatonya Presiden Soekarno menyatakan “Maka sekarang karena ternyata bahwa Malaysia dijadikan menjadi anggota Dewan Keamanan, saja menjatakan Indonesia keluar dari PBB”.

Operasi-operasi militer pun masih terus dilakukan oleh pihak Indonesia. Hingga pada 10 Maret 1965 tersiar kabar bahwa Pemerintah Singapura telah menangkap dua tentara Indonesia yang bernama Kopral KKO Usman dan Kopral KKO Harun, yang dicurigai telah melakukan sabotase dengan melakukan pengeboman di Hotel Mc Donald Singapura. Di lain pihak tentara-tentara Indonesia masih gencar melakukan operasi militer terhadap Malaysia. Namun banyak kegagalan-kegagalan yang dialami pasukan Indonesia. Hal ini membuat Presiden Soekarno kecewa.

Kegoncangan di bidang politik dalam negeri Indonesia yang disebabkan oleh meletusnya pemberontakan bersenjata G.30.S/PKI pada 30 September 1965 dan konstelasi politik dalam negeri yang timbul sebagai akibat gagalnya pemberontakan itu telah menyebabkan Indonesia beralih kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Akhirnya setelah kepemimpinan berpindah tangan, usaha-usaha untuk menormalisasikan hubungan antara Indonesia dan Malaysia pun dilakukan. Pada 28 Mei 1966, pihak Malaysia dan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik, setelah mengadakan konferensi di Bangkok (Arifin, 2009). Konferensi ini menghasilkan Perjanjian Bangkok yang berisi:

- 1) Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia
 - 2) Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik
 - 3) Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan
- Normalisasi hubungan dengan pihak Singapura telah dilakukan terlebih dahulu dengan perantara Habibur Rachman (Dubes Pakistan untuk Myanmar). Kekerasan akhirnya berakhir pada 11 Agustus 1966 dan diresmikan dua hari kemudian.

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul “Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966” karya Talitha Raissa Ramadhani (2024) dari Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini berfokus pada latar belakang dan perkembangan konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966. Kajian pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini mencakup penyebab politik dan sosial dari konfrontasi, termasuk pelanggaran kesepakatan Manila Accord oleh Malaysia dan reaksi pemerintah Indonesia terhadap situasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Konfrontasi ini dipicu oleh pandangan Indonesia yang menganggap Federasi Malaysia sebagai upaya Inggris untuk memperkuat pengaruh kolonial di Asia Tenggara. Dalam hal ini, tindakan nyata yang diambil oleh Indonesia termasuk pengiriman pasukan tidak resmi dan pelarangan perdagangan dengan Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara kedua negara, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Persamaan kajian pada penelitian yang akan peneliti laksanakan dengan penelitian terdahulu (karya Talitha Raissa Ramadhani) yakni sama-sama membahas mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia pada periode yang sama. Perbedaan yang membedakan penelitian ini adalah fokusnya; penelitian Talitha lebih menekankan pada aspek politik dan tindakan militer Indonesia, sedangkan penelitian yang hendak peneliti kaji akan lebih mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari konfrontasi tersebut di kalangan masyarakat yang terdampak.

2. Penelitian oleh Imantri Perdana, Ridwan Melay, dan Kamaruddin (2019) artikel jurnal yang diterbitkan pada tahun 2019 dalam Jurnal Sejarah dan Budaya Volume 13, Nomor 2 meneliti dampak konfrontasi Indonesia-Malaysia pada perekonomian masyarakat Tanjung Balai Karimun selama periode 1963-1966. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum konfrontasi, perekonomian di daerah tersebut cukup bergairah, berkat penggunaan mata uang Dollar yang membuat Kepulauan Riau dikenal sebagai "*Surga Dollar*." Namun, konflik yang

dipicu oleh upaya Federasi Malaya untuk menggabungkan wilayah Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia, dianggap sebagai bentuk kolonialisme oleh Presiden Soekarno, mengakibatkan penetapan larangan penggunaan Dollar Singapura dan Malaysia, yang kemudian diganti dengan mata uang Kepulauan Riau Rupiah (KRRp) pada 15 Oktober 1963. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari konfrontasi, perubahan ekonomi masyarakat, dampak yang ditimbulkan, serta kebijakan pemerintah dan peran organisasi internasional dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dari buku, wawancara, dan dokumen relevan, yang menunjukkan bahwa konfrontasi berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat Tanjung Balai Karimun.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain: subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, temporal penelitian, dan bidang ilmu yang dianggap sesuai dengan isi penelitian.

1. Objek Penelitian

Dampak ekonomi dari terjadinya Konfrontasi Indonesia dan Malaysia Pada tahun 1963-1966.

2. Subjek Penelitian

Konfrontasi Indonesia dan Malaysia.

3. Tempat Penelitian

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), PERPUSNAS dan Perpustakaan Universitas Lampung.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2025.

5. Konsentrasi Ilmu

Konsentrasi penelitian ini adalah Ilmu Sejarah.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, data, dan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Metode ini mencakup perancangan penelitian yang meliputi: prosedur,

tahapan yang harus dilalui, durasi penelitian, sumber data, cara memperoleh data, serta pengolahan dan analisis data. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*," yang berarti cara atau jalan. Dalam konteks ilmiah, metode merujuk pada prosedur atau cara kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus dari ilmu yang dipelajari (Hamid, 2014). Tujuan penelitian historis adalah menyusun kembali peristiwa masa lalu secara terstruktur dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan menyintesis berbagai bukti untuk menetapkan fakta serta menghasilkan kesimpulan yang solid.

Penelitian sejarah memerlukan keterampilan berpikir kritis dalam menganalisis pengalaman manusia di masa lalu. Menurut Djoko Soerjo, sejarah adalah usaha untuk membangun kembali peristiwa masa lalu yang mencakup yang dipikirkan, dilakukan, diucapkan, dirasakan, serta dialami seseorang (Alian, 2012). Metodologi dalam ranah sejarah sebagai disiplin ilmu akan menghasilkan karya tulis sejarah, yang dikenal sebagai historiografi (Laksono, 2018). Tahapan-tahapan dalam metode penelitian sejarah bertujuan untuk menghasilkan tulisan sejarah yang tersusun secara kronologis dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

1. Heuristik

Heuristik, dalam terminologi, berasal dari bahasa Yunani "*heuristiken*" yang berarti mengumpulkan atau menentukan sumber. Sumber yang dimaksud adalah berbagai materi sejarah yang tersebar dan beragam, seperti catatan, tradisi lisan, serta reruntuhan atau peninggalan bangunan prasejarah (Suhartono, 2014). Penulisan sejarah tidak dapat dilakukan tanpa adanya sumber-sumber ini. Dalam tahap heuristik, seorang peneliti sejarah memasuki lapangan untuk mengumpulkan sumber-sumber tersebut. Di lapangan, kemampuan teoritis yang bersifat deduktif-spekulatif diwujudkan dalam bentuk proposal atau rancangan penelitian yang nantinya akan diuji secara induktif-empirik atau pragmatis (Daliman, 2018). Tahap heuristik ini peneliti akan melakukan pencarian sumber di Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Lampung, dan juga pada internet. Dengan melakukan pencarian sumber tersebut maka peneliti akan menemukan asrip-arsip, foto, surat kabar, buku dan juga majalah yang berkaitan dengan topik yang akan peneliti kaji.

2. Kritik

Kritik merupakan proses seleksi sumber sejarah yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik dengan tujuan menemukan fakta sejarah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap kritik sumber, terdapat dua jenis kritik yang dilakukan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal berfokus pada meneliti asal-usul dan keaslian sumber, mengidentifikasi sumber-sumber untuk memperoleh informasi, serta memeriksa apakah ada perubahan pada sumber tersebut. Kritik eksternal berkaitan dengan keaslian dan keutuhan sumber sejarah. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber sejarah yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi isi sumber tersebut. Tujuan dari kritik internal adalah menilai kredibilitas informasi yang disajikan, dengan memperhatikan sumber-sumber yang mendukung atau bertentangan. Kritik internal lebih menekankan pada keakuratan fakta yang terdapat dalam sumber sejarah (Helius, 2007).

Peneliti melakukan kritik terhadap sumber sejarah yang telah dikumpulkan, termasuk sumber primer dan sekunder. Mereka menguji dan membandingkan isi sumber tersebut untuk menemukan fakta-fakta sejarah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah proses penafsiran atas fakta-fakta sejarah untuk menetapkan makna dan saling-hubungan antara mereka. Interpretasi merupakan upaya untuk memahami realitas masa lampau melalui rekonstruksi peristiwa-peristiwa yang telah diverifikasi. Fakta-fakta sejarah yang masih terlihat dalam berbagai peninggalan dan dokumen hanya merupakan sebagian dari fenomena realitas masa lampau itu sendiri. Misalnya, masa lampau akan tetap menjadi masa lampau dan tidak akan menjadi realitas lagi. Tugas interpretasi adalah memberikan penafsiran dalam kerangka memugar suatu rekonstruksi masa lampau. Fakta sejarah dalam kaitannya dengan tugas atau fungsi rekonstruksi hanya berfungsi sebagai bukti di masa sekarang bahwa realitas masa lampau pernah terjadi (Daliman, 2018). Pada tahap ini, peneliti akan melakukan

penafsiran terhadap data dan sumber-sumber yang telah ditemukan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Historiografi

Historiografi adalah tahap akhir dalam penelitian sejarah, yang dilakukan setelah melewati proses heuristik, kritik, dan interpretasi. Ini merupakan proses penulisan sejarah yang mencakup penyusunan, pemaparan, dan pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan (Wahyudi, 2014). Penulisan sejarah tidak hanya sekadar mengorganisir fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian, tetapi juga menyampaikan pemikiran melalui interpretasi sejarah yang didasarkan pada fakta-fakta tersebut, yang memerlukan keterampilan dan keahlian. Peneliti menggabungkan dan menyusun data yang telah melalui tahap heuristik, kritik, dan interpretasi untuk menghasilkan rekonstruksi peristiwa sejarah yang sesuai dengan topik penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang reliabel dan valid dalam penelitian. Jika tidak menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat memperoleh data-data sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2010). Dengan demikian, teknik pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh data-data yang terpercaya terkait topik penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap heuristik, yang merupakan tahap awal dalam metode penelitian sejarah. Heuristik bertujuan menghimpun data-data yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji, sehingga memastikan bahwa data yang diperoleh adalah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen historis yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Dokumen ini dapat berupa arsip resmi,

surat-surat, laporan, foto, peta, rekaman, dan dokumen lainnya yang bersifat primer maupun sekunder.

2. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai literatur atau pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi/tesis sebelumnya, ensiklopedia, serta sumber online yang kredibel.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya sistematis untuk menata catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna (Rijali, 2018). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data historis. Teknik analisis data historis melibatkan analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan penulisan sejarah (Helius, 2007).

Analisis data historis merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian sejarah karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks masa lalu secara lebih mendalam. Teknik ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan sumber sejarah, tetapi juga pada evaluasi kritis terhadap keabsahan dan relevansi sumber tersebut. Proses ini melibatkan penilaian terhadap otentisitas (kritik eksternal) dan keandalan informasi yang terkandung di dalamnya (kritik internal). Dengan menggunakan analisis data historis, peneliti dapat menyusun narasi sejarah yang lebih akurat dan berimbang, serta menghindari distorsi informasi yang dapat timbul akibat penggunaan sumber yang tidak valid atau bias. Teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa temuan-temuan sejarah dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman kita tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses untuk menyimpulkan data dan mengelompokkan informasi ke dalam konsep, kategori, atau tema tertentu.

2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan, yang menggabungkan informasi dalam suatu bentuk yang padat dan mudah diakses. Ini memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi dan memeriksa kesimpulan, serta memungkinkan analisis ulang jika diperlukan (Rijali, 2018).

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan oleh peneliti dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan data di lapangan. Sejak awal, peneliti kualitatif mencari makna dari objek yang diteliti, mencatat pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Konfrontasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Pemutusan hubungan dagang dengan Malaysia dan negara-negara Barat menyebabkan penurunan ekspor dan impor, yang pada akhirnya memperburuk krisis ekonomi dalam negeri. Untuk membiayai konfrontasi, pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, yang menyebabkan inflasi ekstrem hingga mencapai lebih dari 600% pada tahun 1965. Investasi asing menurun drastis karena kebijakan nasionalisasi perusahaan asing serta ketidakstabilan politik dan ekonomi. Akibatnya, banyak industri mengalami kemunduran dan daya beli masyarakat semakin melemah. Isolasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno, terutama melalui pemutusan hubungan dengan negara-negara kapitalis, semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, menyebabkan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran. Kebijakan yang diambil Indonesia pada masa Perang Dingin 1963-1966, meskipun didorong oleh tujuan politik dan ideologi, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, seperti efisiensi, alokasi sumber daya yang optimal, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan seperti konfrontasi internasional, nasionalisasi perusahaan asing, kontrol harga yang ketat, serta upaya swasembada yang tidak realistis, mengarah pada krisis ekonomi yang parah, dengan inflasi tinggi, kelangkaan barang, dan penurunan kesejahteraan sosial. Kurangnya perencanaan jangka panjang dan keterbatasan dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan dinamika global memperburuk situasi. Namun, meskipun banyak kebijakan yang gagal, periode ini memberikan pelajaran penting yang kemudian membentuk perubahan arah kebijakan ekonomi setelah 1966, yang lebih berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan terbuka terhadap kerja sama internasional.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno menerapkan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Namun, kurangnya pengalaman dalam mengelola perusahaan yang dinasionalisasi menyebabkan banyak perusahaan mengalami kemunduran. Sistem Ekonomi Terpimpin yang dijalankan oleh pemerintahan Soekarno berusaha mengontrol sektor ekonomi secara sentralistik.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat memahami bahwa kebijakan politik luar negeri yang konfrontatif, seperti Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963–1966, tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga memberi pengaruh signifikan terhadap stabilitas dan kondisi ekonomi nasional, seperti meningkatnya inflasi, krisis pasokan barang, dan tekanan pada anggaran negara.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam dampak ekonomi Konfrontasi Indonesia-Malaysia dengan pendekatan kuantitatif atau studi perbandingan terhadap negara lain yang mengalami konflik serupa, guna memperkaya wawasan akademik dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

5.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian mengenai hubungan antara kebijakan luar negeri dan dampaknya terhadap kondisi domestik perlu terus dikembangkan, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan politik, agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan relevan bagi generasi masa kini maupun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam, R. B., dkk. 2010. *Sejarah Tingkatan 5 Buku Teks Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah*. Kuala Lumpur: Percetakan Naz Sdn Bhd.
- Ahmad, M. 2010. *Konflik Indonesia–Malaysia: Dampaknya terhadap Ekonomi dan Sosial Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Sejarah Indonesia.
- Anne, B. 1998. *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries* (p. 246). London: Macmillan.
- Anthony Pratkanis & Elliot Aronson, W.H. Freeman.1991. *Age of Propaganda : The Everyday Use and Abuse of Persuasion*.
- C.M.Turnbull. 2009. *A History of Modern Singapore, 1819–2005*. NUS Press.
- Cribb, R. & K., & Audrey. 2004. *Historical Dictionary of Indonesia*. Scarecrow Press.
- Crouch Harold. 1978. *The Army and Politics in Indonesia*. Cornell University Press.
- Daliman.A. (2018). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Darmawan. 2005. *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*. Malang: CV Hikayat Dunia.
- Djoened, M. 2010. *Konflik Konfrontasi Indonesia–Malaysia 1963–1966: Sebuah Tinjauan Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Efantino F. Arifin. 2009. *Ganyang Malaysia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Elson, R. E. 2001. *Suharto: A Political Biography*. Cambridge University Press.
- Hal Hill. 1996. *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant*. Cambridge University Press.
- Hamid, D. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Haryono, M. 2007. *Politik Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963–1966*. Jakarta: Penerbit Narasi.
- Helius, S. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hindley, D. 1964. *The Communist Party of Indonesia, 1951–1963*. University of California Press.
- Legge, J. D. 1972. *Sukarno: A Political Biography*. Allen Lane.
- Mackie, J. A. C. 1974. *Konfrontasi: The Indonesia–Malaysia Dispute, 1963–1966*.

Oxford University Press.

- Maidin, S. H. B. M. 2010. *Propaganda dan perang saraf dalam era konfrontasi Malaysia-Indonesia 1963-1966*. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya.
- Pickleft, Ricklefs. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pickleft, Ricklefs. 1993. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200, ed. ke-2*. Stanford: Stanford University Press.
- Nugroho, T. 2004. *Peran Indonesia dalam Konflik Asia Tenggara pada Tahun 1960-an*. Yogyakarta: Penerbit Sejarah Indonesia.
- Osborne, M. 2000. *Southeast Asia: An Introductory History*. Allen & Unwin.
- Pratkanis, A., & Aronson, E. 2001. *Age of propaganda: The everyday use and abuse of persuasion*. New York: Henry Holt and Co.
- Rahardjo, S. 2005. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pembentukan Federasi Malaysia*. Jakarta: Penerbit Politik Nusantara.
- Santoso, R. 2003. *Sejarah Kalimantan dan Peranannya dalam Perang Dingin*. Jakarta: Penerbit Sejarah Nusantara.
- Sastro, P. 2002. *Sejarah Perang Dingin dan Gerakan Non-Blok*. Jakarta: Penerbit Sejarah Dunia.
- Sofyan Saleh dkk. 2000. *Perekonomian Indonesia Dalam Prespektif Waktu*. Surabaya: Pamator.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono. 2014. *Psikolinguistik*. In: *Psikolinguistik dan Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sukarman, A. 2018. *Konfrontasi Indonesia–Malaysia 1963–1966: Dinamika Politik dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kalimantan Barat*. Pontianak: STKIP Persada Khatulistiwa Press
- Suroso. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryadinata, L. 1978. *Indonesia's Foreign Policy under Sukarno: Ideology and Implementation*. Singapore University Press.
- Susastro, H. dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir Jilid II 1959-1966*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tarling, N. 1992. *The Cambridge History of Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Wahyudi., M. D. M. J. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

- Alian. 2012. Metodologi sejarah dan implementasi dalam penelitian. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Sejarah*, 2(2), 1–14. repository.unsri.ac.id/22614
- Darmawansyah, A. F., Eltika, A., Seprina, R., 2023. Kajian sejarah konfrontasi Malaysia. *Jurnal Sejarah Universitas Jambi*, 9(1), 65–78. uniflor.ac.id/e-journal/index.php/sajaratun/article/view/4314
- Sutrisno, H. 2013. Konfrontasi Indonesia-Malaysia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia (1963-1966). *Avatara Ejournal Pendidikan Sejarah*, 1(3). ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/4155
- Kusmayadi, Y. 2017. Politik luar negeri Republik Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966. *Jurnal Artefak*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.25157/ja.v4i1.732>
- Laksono, A. D. 2018. Keefektifan model project based learning terhadap keaktifan dan hasil belajar IPA kelas V SDN Sumberejo 2 Bonang. *Jurnal Sekolah (JS)*, 2(2), 69–75. <https://doi.org/10.24114/js.v2i2.9516>
- Lilik, S. 2008. Meninjau kembali konflik perang dingin: Liberalisme vs komunisme. *Media Jurnal Global Dan Strategi*, 2(1). journal.unair.ac.id/JGS@meninjau-kembali-konflik-perang-dingin--liberalisme-vs-komunisme-article-2823-media-23-category-8.html
- Mardiyah, S. 2019. Konfrontasi Indonesia – Malaysia dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 14(2), 115–130. <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v9i1.4314>
- Nur, C., & Ravico, R. 2021. Ganyang Malaysia: Studi historis politik luar negeri Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966. *Danadyaksa Historica*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i1.3594>
- Ramadhani, & Talitha Raissa. 2023. Konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, 11(21), 51-89.
- Rijali, A. 2018. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Internet dan Sumber Lainnya:

- Bank Indonesia. 1966. *Laporan Perekonomian Indonesia 1965* (p. 57). BI Press.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 1970. *Dokumen-Dokumen Konfrontasi Indonesia–Malaysia*.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1964. *Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Latar Belakang dan Sikap Indonesia*.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1965. *Dokumentasi Konfrontasi Indonesia–Malaysia: Dari Politik Konfrontasi Menuju Politik Damai*.

Amanat-komando Presiden/Pangliam Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia Didepan Istana Merdeka, Djakarta 3 Mei 1964. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sejarah dan Sosial. 2024, March 17. Dampak Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1960-an. Retrieved November 10, 2024, from kumparan website:<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/dampak-konfrontasi-indonesia-malaysia-pada-1960-an-22MqwdADbsP>

Kumparan, 2024, *Dampak Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1960-an*, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/dampak-konfrontasi-indonesia-malaysia-pada-1960-an-22MqwdADbsP/3>